

**MANAJEMEN DATA TERPADU SOSIAL BANUA (DATU SOBAN)
DALAM MENDUKUNG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Irfan Baihaqi Mufid

NPP. 32.0757

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0757@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dedi Kusmana, S.Sos, M,Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Datu Soban is an e-government-based innovation developed to establish a more accurate, integrated, and responsive social welfare data system that meets the needs of the community. The persistently high poverty rate in Banjarmasin City highlights the importance of having valid and up-to-date data to support social assistance programs in achieving accurate targeting. A discrepancy has been identified between poverty data from BPS (Statistics Indonesia) and that recorded in Datu Soban.* **Purpose:** *This study aims to comprehensively analyze the management of the Integrated Social Data of Banua (Datu Soban) in supporting the distribution of social assistance by the Social Affairs Office of Banjarmasin City, South Kalimantan Province.* **Method:** *The research uses a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation.* **Results:** *The results show that the management of Datu Soban is fairly effective, with the implementation of core management functions such as planning, organizing, executing, and monitoring. Most of the established indicators have been adequately implemented; however, there are still issues related to the division of roles and responsibilities. Supporting factors in the management of Datu Soban include the presence of clear regulations, adequate facilities and infrastructure, and the provision of training and technical guidance for personnel.* **Conclusion:** *The management of the Integrated Social Data of Banua (Datu Soban) in supporting the distribution of social assistance by the Social Affairs Office of Banjarmasin City, South Kalimantan Province, has been conducted fairly well. Nevertheless, some obstacles remain, highlighting the need to optimize regular data updating, improve digital literacy among citizens, and enhance inter-agency system integration to foster transparent, accountable, and service-oriented social data governance.*

Keywords: *Datu Soban, data management, social assistance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Datu Soban merupakan inovasi berbasis e-government yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem pendataan kesejahteraan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang masih tinggi di Kota Banjarmasin menunjukkan pentingnya data yang valid dan terkini dalam mendukung program-program bantuan sosial agar tepat sasaran. Terdapat perbedaan data kesiskinan yang ada di BPS dan Datu Soban.* **Tujuan:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dalam mendukung penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.* **Metode:** *Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.* **Hasil:** *Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Datu Soban sudah cukup baik*

dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari indikator-indikator yang ada sudah terlaksana dengan baik, namun dari segi pembagian tugas dan tanggung jawab masih terdapat permasalahan. Faktor pendukung dalam manajemen Datu Soban antara lain adalah adanya regulasi yang jelas, sarana dan prasarana yang lengkap, dan adanya pelatihan serta bimbingan teknis untuk petugas. **Kesimpulan:** Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan cukup baik. Namun memang masih ditemukan beberapa hambatan, untuk itu perlunya optimalisasi pemutakhiran data secara berkala, peningkatan literasi digital masyarakat, dan integrasi sistem antar lembaga guna mendukung terciptanya tata kelola data sosial yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: Datu Soban, manajemen data, bantuan sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan serius, baik secara nasional maupun global. Di Indonesia, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan, namun efektivitasnya seringkali terkendala oleh lemahnya sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). Dalam menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep electronic government (e-government) menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam penanggulangan kemiskinan. E-government memungkinkan terselenggaranya sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan dukungan sistem data yang terintegrasi. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan e-government di sektor sosial adalah penyediaan data yang akurat dan terbaru untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, implementasi e-government diwujudkan melalui aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) yang dikelola oleh Dinas Sosial. ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital (Valdivia & López: 2022). Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara terintegrasi di 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Banjarmasin. Datu Soban diharapkan menjadi basis data utama dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Datu Soban, terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2023, BPS mencatat 33.467 jiwa penduduk miskin, sedangkan Datu Soban mencatat hanya 23.693 jiwa. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi, validitas, dan efektivitas manajemen data dalam sistem Datu Soban, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi dalam pengembangan kompetensi yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja dan kualitas layanan publik (Eaton et al: 2022).

Berangkat dari realitas tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana manajemen data dalam

aplikasi Datu Soban diimplementasikan, serta sejauh mana sistem ini mampu mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan secara akurat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat topik tentang manajemen data dalam e-government melalui studi kasus aplikasi Datu Soban di Kota Banjarmasin.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran e-government dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Sebagian besar studi menekankan pada manfaat e-government dalam efisiensi layanan, transparansi data, dan penguatan partisipasi masyarakat. Namun, sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas manajemen data pada platform e-government yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah.

Selain itu, meskipun aplikasi Datu Soban telah menjadi inisiatif penting dalam sistem digitalisasi data sosial di Kalimantan Selatan, masih terdapat kesenjangan antara implementasi sistem dan hasil yang dicapai. Ketidaksesuaian data antara Datu Soban dengan data BPS menunjukkan adanya persoalan pada aspek pemutakhiran data, validitas informasi, serta integrasi lintas sistem dan lembaga.

Penelitian-penelitian terdahulu juga belum banyak membahas secara spesifik bagaimana proses manajemen data pada Datu Soban dilakukan, termasuk peran sumber daya manusia, tantangan teknis, dan kebijakan pendukung yang memengaruhi kualitas data. Kesenjangan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen data sosial melalui e-government, sehingga tujuan utama yaitu penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dapat tercapai secara optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Manajemen Data untuk penyaluran bantuan sosial.

Penelitian Pertama oleh Tegar Almuufarid, Syamsul Alam, dan Justawan (2024) berjudul "Optimalisasi Layanan Konsultasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bansos pada Dinsos Kota Kendari". Penelitian ini menyoroti pentingnya layanan konsultasi DTKS dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi layanan konsultasi dapat membantu dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses DTKS.

Penelitian Kedua oleh Dezzi Lasari dan Helmi Ali (2023) berjudul "Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam". Penelitian ini membahas strategi pengelolaan DTKS di Kabupaten Agam, dengan fokus pada pemutakhiran data dan validasi informasi penerima bantuan. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengelolaan data yang akurat, yang berdampak pada ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Penelitian Ketiga oleh Futry Diviana Agnia dan Deden Abdul Wahab Sya'roni (2024) berjudul "Evaluasi Manajemen Data Operasional pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menggunakan DMBOK dan CMMI". Studi ini mengevaluasi manajemen data operasional DTKS di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kerangka kerja DMBOK dan CMMI. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi sistem dan standarisasi proses sangat penting untuk meningkatkan

kualitas data, yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Penelitian Keempat oleh Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh (2022) berjudul "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara". Penelitian ini mengkaji strategi pemanfaatan DTKS dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi data yang berkelanjutan serta koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Penelitian Kelima oleh Susila Wati (2022) berjudul "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh". Studi ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan DTKS di Kota Banda Aceh, terutama terkait sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi informasi menjadi hambatan dalam memastikan data yang akurat dan terkini untuk penyaluran bantuan sosial.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada pendekatan dan fokus kajian terhadap manajemen data sosial dalam konteks aplikasi Datu Soban, yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek strategis, teknis, atau tantangan umum dalam pengelolaan DTKS di berbagai daerah, penelitian ini secara khusus menelusuri manajemen data pada sistem Datu Soban dengan menekankan pada dimensi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sesuai teori manajemen George R. Terry.

Tidak seperti penelitian oleh Tegar Almuufarid dkk. (2024) yang menitikberatkan pada layanan konsultasi DTKS dan kurang mengeksplorasi proses manajerial secara menyeluruh, atau studi oleh Dezzi Lasari dan Helmi Ali (2023) yang menyoroti keterbatasan SDM tanpa membahas faktor pendukung seperti regulasi dan sarana teknis, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap aspek-aspek teknis, struktural, dan strategis dari pelaksanaan manajemen data. Sementara itu, Futry Diviana Agnia dkk. (2024) lebih menekankan evaluasi melalui kerangka DMBOK dan CMMI, penelitian ini menggunakan pendekatan manajerial klasik yang lebih aplikatif di tingkat implementasi daerah.

Di sisi lain, penelitian Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Laoh (2022) menyoroti pemanfaatan DTKS untuk program khusus seperti RS-RTLH, sedangkan penelitian ini mengulas aplikasi Datu Soban secara lebih luas dalam konteks bantuan sosial di wilayah perkotaan. Adapun Susila Wati (2022) yang membahas pengelolaan data di Banda Aceh, cenderung fokus pada kendala sinkronisasi data, sementara penelitian ini memperluas cakupan dengan memaparkan upaya penyelesaian melalui pelatihan, regulasi, dan keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan manajemen klasik dengan studi kasus e-government daerah melalui Datu Soban, serta pengungkapan faktor-faktor pendukung dan penghambat secara komprehensif dari sisi internal organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana inovasi data sosial digital dapat diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin secara tepat sasaran.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liangputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Selanjutnya menurut Fatimah (2019) mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan penelitian lebih ditekankan

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi perspektif berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelatihan tersebut. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana pelatihan dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pelatihan dan kompetensi pegawai. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Peneliti Teori Manajemen (Yusuf et al., 2023:20-30) terdapat 4 dimensi yaitu sebagai

berikut:

1. Perencanaan (planning) dengan indikatornya Tujuan yang jelas dan relevan, Rencana yang terukur dan realistis serta Penggunaan data dan analisis situasi dalam perumusan rencana.
2. Pengorganisasian (organizing) dengan indikatornya Struktur organisasi yang jelas dan efektif dan Pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai.
3. Penggerakan (actuating) dengan indikatornya Motivasi pegawai dalam bertugas dan Komunikasi efektif
4. Pengendalian (controlling) dengan indikatornya Sistem pemantauan kinerja, Tindakan korektif yang diambil dan Frekuensi evaluasi kinerja.

3.1 Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan atau planning adalah proses sistematis dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam penelitian ini dipaparkan 3 indikator sesuai kondisi yang ada dilapangan, yaitu tujuan yang jelas dan relevan. Rencana yang terukur dan realistis, penggunaan data dan analisis situasi dalam perumusan rencana.

a. Tujuan yang jelas dan relevan

Tujuan yang jelas dan relevan adalah pernyataan yang menggambarkan sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai, dengan fokus pada keterkaitan langsung terhadap masalah atau kebutuhan tertentu. Tujuan dari Datu Soban tercantum dalam Buku Saku Datu Soban PPKS dan PSKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Adapun tujuan pendataan aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dilakukan adalah sebagai berikut.

- Adanya kesamaan pemahaman dan persepsi bagi petugas data dan supervisor data dalam melaksanakan pendataan PPKS dan PSKS.
- Adanya keseragaman pola dalam melaksanakan pendataan PPKS dan PSKS.
- Tersedianya alat bantu bagi petugas data dan supervisor data dalam melaksanakan pendataan PPKS dan PSKS.
- Upaya padu pada data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan keamanan serta kerahasiaan penyimpanan data dengan Dinas Komunikasi dan Informasi.
- Tersedia data PPKS dan PSKS yang mutakhir dan dapat diandalkan.
- Sebagai Produsen Data tingkat Daerah yang mendukung SATU DATA INDONESIA (SDI)

b. Rencana yang terukur dan realistis

Rencana yang terukur dan realistis dalam konteks Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial yang berbasis data. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, terdapat sekitar 23.693 ribu jiwa yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin. Untuk mengatasi masalah ini, langkah awal adalah melakukan pengumpulan dan analisis data secara menyeluruh melalui sistem Data Terpadu Sosial Banua. Dengan teknologi big data, informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial.

Rencana dalam pemanfaatan aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) tertuang dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Banjarmasin tahun 2023-2026. Untuk memastikan keberhasilan rencana tersebut, alokasi sumber daya harus dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Dengan pendekatan berbasis data ini, program-program

sosial dengan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dapat dilaksanakan secara terukur dan realistis sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kota Banjarmasin yang membutuhkan. Perencanaan sudah terukur menyesuaikan anggaran yang ada jadi semua program-program yang dijalankan dapat terealisasi. Dengan anggaran yang jelas program yang dibuat juga akan terukur dan realistis.

c. Penggunaan data dan analisis situasi dalam perumusan rencana

Penggunaan data dan analisis situasi dalam perumusan rencana Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program-program sosial yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang tepat dan efektif. Data berfungsi sebagai dasar untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Analisis situasi juga melibatkan pemetaan kondisi sosial di Kota Banjarmasin untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Proses ini penting untuk memahami konteks lokal dan memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, Dinas Sosial dapat mengarahkan sumber daya ke area yang paling membutuhkan, sehingga program-program yang dilaksanakan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang rentan. Dengan memahami kondisi yang ada, Dinas Sosial dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusan rencana yang terjadi sudah sesuai dengan data dan situasi yang ada sehingga dapat menghasilkan rumusan yang efektif dan tepat sasaran,

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian atau organizing adalah proses yang melibatkan pembagian pekerjaan, pengelompokan tugas, dan penempatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Berdasarkan hal tersebut peneliti memaparkan 2 indikator yang dapat dilihat dari struktur organisasi yang jelas dan efektif serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai.

a. Struktur organisasi yang jelas dan efektif

Dalam konteks ini, pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan struktur yang jelas dan efektif di dalam organisasi, sehingga setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Struktur organisasi di Dinas Sosial umumnya terdiri dari beberapa komponen kunci yang berfungsi untuk mengelola berbagai aspek pelayanan sosial. Berikut adalah gambaran umum dari struktur organisasi di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

- Kepala Dinas bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Dinas Sosial, berkedudukan di bawah Gubernur atau Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam manajemen administrasi dan operasional Dinas, mengawasi pelaksanaan tugas di setiap sub-bagian dan bidang, dan menjadi penghubung antara Kepala Dinas dengan staf lainnya.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola administrasi umum, termasuk pengarsipan dokumen dan surat menyurat dan bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM.
- Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas mengelola anggaran Dinas Sosial, termasuk perencanaan dan pelaporan keuangan dan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penerimaan dana, serta audit keuangan.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan bertugas menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Sosial dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan.
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas mengelola program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan melaksanakan kebijakan terkait jaminan sosial, termasuk bantuan untuk korban bencana alam, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bertugas menyediakan layanan rehabilitasi bagi individu yang mengalami masalah sosial, seperti pengguna napza, anak terlantar,

dan lanjut usia dan mengembangkan program-program untuk reintegrasi sosial bagi mereka yang telah menjalani rehabilitasi.

- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial berokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas serta mengimplementasikan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
- Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi bertugas untuk mengelola sistem informasi dan data terkait kesejahteraan sosial
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi sebagai lembaga pelaksana di lapangan untuk berbagai program Dinas Sosial.

Struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin sudah disusun secara jelas dan efektif mungkin sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 103 Tahun 2021. Setiap posisi sudah terisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya. susunan struktur organisasi di Dinas Sosial Kota Banjarmasin sudah jelas, masing-masing bidang sudah memiliki tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri. Para pegawai melaksanakan tugas mereka sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, yang didasarkan pada dokumen-dokumen resmi yang menjadi pedoman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur organisasi yang jelas setiap pegawai dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat bekerja dengan efektif.

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dalam suatu organisasi adalah proses pengorganisasian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan dapat berkontribusi secara efektif. Berikut adalah beberapa pembagian tugas dan tanggung jawab dalam manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

- Operator pengelola Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban)
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Operator memiliki sejumlah tanggung jawab. Tugas tersebut meliputi memeriksa ulang dokumen verifikasi dan validasi, yang mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, keakuratan pengisian, serta kualitas data yang diperoleh.
- Supervisor
Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Supervisor adalah individu yang memiliki kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, yang berasal dari elemen PSKS atau aparatur sipil negara. Tugas dan tanggung jawab Supervisor dalam manajemen data meliputi pembinaan, pengawasan, dan dukungan kepada fasilitator di tingkat masyarakat.
- Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLTR)
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, fasilitator adalah petugas lapangan yang bertugas menjalankan fungsi SLRT, terutama dalam hal menjangkau dan memfasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Fasilitator ini berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat. Tugas dan tanggung jawab fasilitator SLRT meliputi berbagai aspek, antara lain melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada masyarakat, memverifikasi data fakir miskin dan orang tidak mampu, mencatat perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu, serta mendokumentasikan kepesertaan dalam program-program yang ada. Di Kota Banjarmasin SLTR yang ditunjuk berjumlah 58 orang, setiap kelurahan memiliki 1 sampai 2 SLTR yang ditunjuk.

Pembagian tugas dalam manajemen Data Terpadu Sosial Banua dilakukan dengan mempertimbangkan kecakapan orang tersebut karena tidak sembarangan orang yang mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Masing-masing individu harus bisa bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan tanggung jawab sudah sesuai, namun masih kurang dalam jumlah petugas untuk manajemen data sehingga proses pemutakhiran data terhambat.

3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan atau actuating adalah salah satu fungsi dasar dalam manajemen yang bertujuan untuk membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pelaksanaan mencakup motivasi pegawai dalam bertugas dan komunikasi yang efektif agar anggota tim aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

a. Motivasi pegawai dalam bertugas

Motivasi pegawai dalam mengelola Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tujuan dalam bekerja, lingkungan kerja, dan pemberian apresiasi serta motivasi. Dalam konteks Dinas Sosial, di mana manajemen data kesejahteraan sosial sangat penting untuk memberikan layanan kepada masyarakat, motivasi pegawai menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi.

Tujuan awal bagi seorang ASN dalam bekerja dapat mempengaruhi motivasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ketika seorang ASN tidak mempunyai tujuan yang kuat dalam bekerja secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerjanya ketika melaksanakan tugas yang diamanahkan. Selain itu, lingkungan kerja juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi ASN. Lingkungan kerja yang positif akan berkontribusi pada peningkatan motivasi seorang ASN dalam bekerja. Target yang jelas dan terukur juga akan mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Apabila target tidak jelas atau membebani maka akan menurunkan motivasi seseorang dalam bekerja. Begitu pun sebaliknya, apabila targetnya jelas dan terukur maka akan meningkatkan motivasi seorang ASN dalam bekerja.

Selain itu, lingkungan yang positif juga akan membantu para pegawai untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Pada saat apel juga ada penyampaian motivasi dan pemberian apresiasi bagi pegawai dengan kinerja terbaik untuk meningkatkan motivasi mereka. Motivasi pegawai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Motivasi pegawai dapat naik dan turun, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk menjaga agar motivasi pegawai tetap tinggi seperti melakukan kegiatan yang positif contohnya apel pagi bersama dan menjaga lingkungan di dalam organisasi tetap positif.

b. Komunikasi efektif

Komunikasi efektif merupakan aspek penting dalam lingkungan organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Pentingnya komunikasi efektif untuk meningkatkan efektifitas dalam bekerja. Komunikasi efektif sangat penting dalam menunjang kinerja di organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan pesan adalah faktor utama yang menentukan efektivitas komunikasi. Ketika pesan disampaikan dengan jelas, penerima dapat memahami informasi tanpa mengalami kebingungan atau kesalahpahaman. Hal ini sangat penting dalam konteks organisasi di mana keputusan sering kali bergantung pada pemahaman yang tepat terhadap instruksi atau informasi yang diberikan.

Keterbukaan dalam komunikasi juga menjadi faktor penting lainnya. ASN yang merasa bebas untuk berbagi pendapat dan masukan cenderung lebih terlibat dalam proses kerja dan memiliki rasa kepemilikan terhadap tugas mereka. Lingkungan kerja yang mendukung keterbukaan dapat menciptakan suasana kolaboratif, di mana ide-ide baru dapat muncul dan dieksplorasi bersama.

Empati sebagai elemen komunikasi efektif membantu membangun hubungan sosial yang kuat antara individu dalam organisasi. Ketika ASN merasa dipahami dan dihargai, mereka lebih mungkin untuk berkontribusi secara positif terhadap tim dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja dan loyalitas ASN.

Umpan balik suatu hal yang penting dalam proses komunikasi yang tidak boleh diabaikan. Umpan balik membantu individu untuk terus belajar dan berkembang, serta meningkatkan kualitas interaksi antar anggota tim. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, Pimpinan dapat membantu pegawainya memahami area di mana mereka perlu meningkatkan diri, sehingga menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif di lingkungan organisasi, penting untuk memperhatikan kejelasan pesan, keterbukaan, empati, dan umpan balik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi internal, memperkuat hubungan antar pegawai, dan pada akhirnya mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien.

4. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian atau controlling adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan, pengendalian berfungsi untuk mengambil tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Dengan kata lain, pengawasan adalah upaya sistematis dalam mengukur, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan kerja agar berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.

a. Sistem pemantauan kinerja

Sistem pemantauan kinerja merupakan alat penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang jelas adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan sistem pemantauan yang efektif. Dengan menetapkan tujuan dan target yang jelas, organisasi dapat lebih mudah mengukur kemajuan dan menentukan apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan harapan.

Pengumpulan data secara sistematis juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pemantauan kinerja. Data yang akurat dan terkini memungkinkan operator untuk melakukan pemantauan apakah sudah memenuhi target. Metode pengumpulan data dapat bervariasi, termasuk survei, observasi langsung, dan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan data secara real-time. Dengan cara ini, organisasi dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Sistem pemantauan kinerja manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dilakukan oleh operator. Data-data yang sudah dikumpulkan dan diinput akan dipantau apakah sudah sesuai atau masih ada kekeliruan yang perlu diperbaiki. Sistem pemantauan kinerja yang efektif memerlukan pengumpulan data yang sistematis, serta umpan balik konstruktif. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya mencapai tujuan strategis mereka.

b. Tindakan korektif yang diambil

Tindakan korektif menjadi langkah penting dalam manajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan di organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tindakan korektif dimulai dengan identifikasi masalah yang jelas. Langkah ini penting karena tanpa pemahaman yang tepat tentang apa yang salah upaya perbaikan tidak akan efektif. Misalnya, dalam kasus target yang tidak tercapai, jika masalah tidak diidentifikasi dengan baik, solusi yang diterapkan mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Setelah masalah diidentifikasi, analisis akar penyebab menjadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Organisasi dapat menggali lebih dalam untuk menemukan penyebab utama dari ketidaksesuaian. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen kualitas total yang menekankan pentingnya memahami dan mengatasi akar masalah untuk mencapai perbaikan jangka panjang.

Perencanaan dan pelaksanaan tindakan korektif juga menjadi fokus utama. Setelah akar penyebab ditentukan, penting bagi organisasi untuk merencanakan tindakan yang sesuai dan melaksanakannya dengan efektif. Misalnya, jika kurangnya pelatihan diidentifikasi sebagai penyebab utama, maka memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai akan menjadi solusi yang

tepat. Hal ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga meningkatkan kemampuan pegawai untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

c. Frekuensi evaluasi kinerja

Frekuensi evaluasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, seperti setiap minggu atau bulan, memberikan struktur yang jelas bagi pegawai untuk memahami harapan organisasi. Dengan adanya jadwal evaluasi yang teratur, pegawai dapat mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik.

Selain rapat rutin ada juga evaluasi dadakan yang dapat membantu dalam sistem pemantauan kinerja. Dalam situasi tertentu, seperti setelah menyelesaikan program besar atau ketika ada perubahan signifikan dalam tugas, evaluasi dadakan dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana pegawai beradaptasi dengan kondisi baru. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menangkap dinamika kerja yang mungkin tidak terlihat dalam evaluasi berkala, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja individu.

Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan untuk membahas laporan kegiatan. Hal ini membuat pegawai dapat bekerja dengan efektif dengan adanya evaluasi alhasil apabila terdapat masalah atau target tidak tercapai dapat dievaluasi dan dicari solusinya.

3.2 Faktor Penghambat Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Besar

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala hal yang mempermudah pelaksanaan manajemen Data Terpadu Sosial Banua oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam mendukung penyaluran bantuan sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya bimbingan teknis yang diberikan kepada supervisor dan fasilitator SLRT, tersedianya fasilitas yang mendukung bagi pelaksana manajemen data, serta adanya regulasi yang jelas. Semua hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan dengan baik. Penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor ini akan diuraikan peneliti sebagai berikut.

a. Dukungan Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk Supervisor dan Fasilitator SLRT

Dukungan bimbingan teknis dan pelatihan penting bagi supervisor dan fasilitator SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui pelatihan, mereka belajar tentang kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dalam manajemen data sosial. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan efektif. Dengan pelatihan yang baik, para pelaksana dapat bekerja lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan.

Selain itu, pelatihan juga membantu mereka menguasai teknologi yang digunakan dalam manajemen data. Mereka diajarkan cara menggunakan perangkat lunak yang memudahkan proses pengumpulan dan analisis data. Ketika mereka tahu cara menggunakan alat ini, pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dan akurat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan.

Komunikasi juga merupakan bagian penting dari pelatihan ini. Supervisor dan fasilitator perlu bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat agar mereka memahami proses verifikasi dan validasi. Pelatihan membantu mereka belajar cara menjelaskan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Ketika masyarakat merasa nyaman dan mengerti, mereka akan lebih terbuka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemberian bimtek terbukti membantu petugas dalam memahami tugas dan fungsi mereka. Tanpa adanya bimtek petugas tidak akan maksimal dalam menjalankan kegiatan.

2. Sarana Pendukung bagi Pelaksana Pengelola Data

Sarana pendukung adalah hal-hal yang membantu para pelaksana dalam mengelola Data Terpadu Sosial Banua dengan lebih baik. Salah satu sarana utama adalah perangkat keras seperti komputer dan akses internet yang stabil memungkinkan mereka mengakses dan mengolah data dengan cepat. Selain itu, perangkat lunak yang sesuai juga sangat penting agar proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan efisien. Ketika semua sarana ini tersedia, para pelaksana dapat bekerja tanpa hambatan teknis.

Fasilitas fisik juga berperan besar dalam mendukung pekerjaan mereka. Ruang kerja yang nyaman membuat para pelaksana bisa fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh masalah lain. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan membuat mereka merasa lebih nyaman saat bekerja.

3. Regulasi Yang Jelas

Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) menunjukkan bahwa keberadaan payung hukum yang mengatur sistem ini sangat penting untuk mempercepat sinergi dan integrasi data sosial di Kalimantan Selatan. Regulasi yang jelas menjadi dasar agar data yang dikelola melalui Datu Soban dapat digunakan secara resmi dan terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, landasan hukum yang kuat juga menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas manajemen data PPKS dan PSKS, sehingga data yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Regulasi tersebut mendukung inovasi tata kelola pemerintahan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Dengan adanya regulasi yang jelas, Datu Soban dapat berfungsi sebagai media resmi pembaruan data terpadu sosial yang diakui secara hukum, sehingga memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kualitas data sosial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah penyebab terhambatnya manajemen Data Terpadu Sosial Banua dalam mendukung proses penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin, yang pada akhirnya menghasilkan data berkualitas rendah dan menghalangi penyaluran bantuan sosial. Kendala-kendala ini menjadi penyebab munculnya permasalahan di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Beberapa faktor penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat meliputi keterbatasan anggaran, penggunaan data penerima bantuan sosial yang belum terbaru, serta kurangnya sumber daya manusia dalam membantu proses pendataan.

1. Keterbatasan Anggaran

Dalam manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang mempengaruhi berbagai aspek pelaksanaan program sosial. Salah satu dampak nyata dari keterbatasan dana adalah penurunan target perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2025, yang hanya mampu memperbaiki 6 rumah, jauh berkurang dibandingkan dengan realisasi 89 rumah pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang terbatas sangat memengaruhi cakupan dan efektivitas program berbasis data Datu Soban.

Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program dari Dinas Sosial. Dengan terbatasnya anggaran bantuan yang diberikan menjadi tidak maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada proses pemutakhiran dan validasi data sosial yang

menjadi inti dari manajemen Datu Soban. Pendataan ulang dan pembaruan data PPKS memerlukan tenaga pendukung yang memadai serta teknologi yang handal, namun dana yang terbatas menghambat penyediaan sumber daya manusia dan sarana teknologi yang optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas dan kelengkapan data, sehingga menghambat pengambilan kebijakan sosial yang tepat dan akurat. Keterbatasan anggaran sama halnya juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmawaty, Jeddawi, & Lukman, (2020) bahwa salah satu kendala belum tercapainya sasaran Proses Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Pemerintah adalah minimnya alokasi anggaran,

Oleh karena itu, penguatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas manajemen Datu Soban. Dengan alokasi dana yang memadai, proses pendataan, pemutakhiran, dan pengembangan sistem digital dapat berjalan lebih lancar, sehingga data sosial yang akurat dan mutakhir dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan. Hal ini akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial yang tepat sasaran.

2. Penggunaan data penerima bantuan sosial yang belum terbaru

Penggunaan data penerima bantuan sosial yang belum diperbarui menjadi faktor penghambat lainnya dalam manajemen Datu Soban. Banyak penerima bantuan yang datanya sudah tidak relevan lagi karena perubahan kondisi sosial-ekonomi mereka, seperti pindah alamat, perubahan status pekerjaan, atau bahkan kematian. Ketika data ini tidak diperbarui secara berkala, maka penyaluran bantuan sosial bisa salah sasaran. Misalnya, bantuan mungkin masih diberikan kepada individu yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.

Proses pemutakhiran data sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan waktu untuk melakukan pendataan ulang. Di samping itu, masyarakat juga mungkin tidak melaporkan perubahan kondisi mereka kepada petugas terkait, sehingga informasi di sistem tetap statis. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan perubahan kondisi mereka dan mempercepat proses pemutakhiran data agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual di lapangan.

3. Kurangnya sumber daya manusia dalam membantu proses pendataan

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala besar dalam manajemen Data Terpadu Sosial Banua. Dinas Sosial sering kali kekurangan tenaga kerja yang cukup untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dan akurat. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi petugas yang ada, sehingga proses verifikasi dan validasi data menjadi lambat dan tidak efisien. Ketidacukupan SDM juga berdampak pada kemampuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bantuan sosial dan pentingnya partisipasi mereka dalam proses pendataan. Sama halnya dengan penelitian oleh Kaligis & Mansyur (2020) yang menyatakan salah satu kendala internal dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

Kekurangan tenaga kerja ini juga mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap setiap kasus individu. Petugas mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa setiap data dengan teliti atau memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang cara mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya perekrutan dan pelatihan tenaga kerja baru agar jumlah SDM mencukupi dan mampu menangani beban kerja dengan lebih baik. Selain

itu, pelibatan komunitas lokal atau relawan juga bisa menjadi solusi untuk membantu proses pendataan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pada Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

1. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program Datu Soban adalah keterbatasan anggaran. Banyak rencana yang sebenarnya sudah disusun dengan matang akhirnya tidak bisa diwujudkan secara maksimal karena dana yang tersedia sangat terbatas. Contohnya, program perbaikan rumah tidak layak huni yang sebelumnya mampu menjangkau puluhan rumah, kini hanya bisa memperbaiki beberapa rumah saja. Padahal, kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial masih sangat tinggi, sehingga keterbatasan anggaran ini sangat terasa dampaknya di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial perlu benar-benar cermat dalam mengelola dan memprioritaskan penggunaan anggaran. Dana yang ada harus difokuskan pada kegiatan yang paling mendesak dan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, seperti pemutakhiran data dan pelatihan petugas pendataan. Selain itu, perlu ada upaya advokasi atau lobi kepada pemerintah daerah agar alokasi anggaran untuk program sosial bisa ditingkatkan. Tidak kalah penting, Dinas Sosial juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta, perusahaan, atau lembaga donor untuk mendapatkan tambahan dana. Dengan begitu, program-program yang sudah dirancang bisa berjalan lebih optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Melakukan Pemutakhiran Data Secara Berkala

Data yang akurat dan terbaru adalah kunci utama agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, masih banyak data penerima bantuan yang belum diperbarui. Seringkali, data yang digunakan masih data lama, padahal kondisi masyarakat bisa berubah dengan cepat—ada yang pindah, ada yang sudah tidak memenuhi syarat, atau bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Akibatnya, bantuan bisa salah sasaran, misalnya diberikan kepada orang yang sudah tidak berhak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Untuk mengatasi masalah ini, pemutakhiran data harus dilakukan secara rutin dan terjadwal. Dinas Sosial perlu melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, bahkan RT/RW untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pendataan berbasis online bisa mempercepat proses updating data dan meminimalisir kesalahan input. Tidak kalah penting, harus ada SOP atau pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana data harus diperbarui, sehingga seluruh petugas bisa bekerja dengan standar yang sama. Dengan data yang selalu mutakhir, program bantuan sosial akan jauh lebih efektif dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Banyak masalah data yang tidak akurat juga disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan. Banyak warga yang tidak melaporkan perubahan kondisi mereka, entah karena tidak tahu caranya, merasa malu, atau bahkan tidak tahu bahwa perubahan tersebut harus dilaporkan. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting agar data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, Dinas Sosial perlu aktif

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan perubahan kondisi, baik secara ekonomi, tempat tinggal, atau status keluarga. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai media, mulai dari pertemuan warga, media sosial, hingga penyebaran pamflet di tempat-tempat umum. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, relawan, dan komunitas lokal dalam proses pendataan juga bisa meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, mereka akan lebih terbuka dan aktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, proses pendataan akan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga kualitas data Datu Soban pun semakin baik dan program bantuan sosial bisa berjalan lebih efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah berjalan cukup baik dalam mendukung penyaluran bantuan sosial. Pelaksanaan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sudah diterapkan secara sistematis meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, serta perbedaan data antara Datu Soban dan BPS.

Temuan ini sejalan dan sekaligus melengkapi hasil dari lima penelitian sebelumnya. Sebagai perbandingan, penelitian Tegar Almuufarid dkk. (2024) di Dinsos Kota Kendari lebih menyoroti peran layanan konsultasi DTKS dalam meningkatkan akurasi data, namun belum menyentuh aspek manajerial secara menyeluruh seperti dalam penelitian ini. Dalam konteks Kota Banjarmasin, penelitian ini tidak hanya menyoroti konsultasi, tetapi juga mengulas strategi manajemen data dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan tindak lanjutnya.

Penelitian oleh Dezzi Lasari dan Helmi Ali (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pemutakhiran data DTKS di Kabupaten Agam. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana kurangnya tenaga lapangan menjadi penyebab utama lambatnya proses pemutakhiran data pada sistem Datu Soban. Namun, penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelatihan dan bimtek kepada petugas dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi kendala tersebut, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian Dezzi dan Helmi.

Futry Diviana Agnia dan Deden Abdul Wahab Sya'roni (2024) mengevaluasi manajemen data operasional DTKS di Jawa Barat menggunakan kerangka DMBOK dan CMMI, yang lebih berfokus pada integrasi sistem dan standarisasi. Penelitian ini berkontribusi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan teori manajemen klasik, sehingga menambah variasi pendekatan ilmiah dalam kajian manajemen data sosial. Fokus pada faktor-faktor seperti motivasi pegawai, komunikasi internal, dan evaluasi berkala memberikan gambaran mikro yang lebih kontekstual terhadap praktik manajemen data sosial di tingkat kota.

Sementara itu, penelitian oleh Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Laoh (2022) menggarisbawahi pentingnya verifikasi dan validasi berkelanjutan serta koordinasi antarlembaga dalam penyaluran bantuan RS-RTLH di Sulawesi Utara. Temuan penelitian ini menegaskan hal tersebut, dengan menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dan sosialisasi yang intensif menjadi faktor penentu dalam memastikan data tetap relevan dan terkini, yang dalam konteks Kota Banjarmasin diwujudkan melalui peran aktif fasilitator SLRT.

Selanjutnya, penelitian oleh Susila Wati (2022) di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa sinkronisasi data antara Dinsos dan Disdukcapil belum optimal akibat terbatasnya teknologi

informasi dan SDM. Penelitian ini membenarkan temuan tersebut, namun lebih jauh memberikan solusi berupa penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi berbasis online, serta kolaborasi lintas sektor melalui Datu Soban untuk mendukung tercapainya prinsip Satu Data Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan utama dari penelitian ini memperluas cakupan wacana akademik terkait manajemen data sosial berbasis digital di daerah, dengan pendekatan komprehensif dari sudut pandang fungsi manajemen klasik. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menyajikan kontribusi baru dalam hal strategi adaptif dan operasional untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Data Terpadu Sosial Banua dalam mendukung penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan cukup baik. Keempat dimensi dari fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengendalian (controlling) sudah dijalankan dengan cukup baik. Ditemukan bahwa tantangan terbesar berasal dari keterbatasan anggaran yang tersedia untuk menjalankan program-program dan manajemen data. Selain itu kurangnya sumber daya manusia juga menghambat proses manajemen. Selain faktor penghambat ada juga faktor pendukung yang membantu proses manajemen Data Terpadu Sosial Banua, yaitu bimbingan teknis dan pelatihan untuk supervisor dan fasilitator SLRT, sarana prasarana yang memadai, dan regulasi yang jelas. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pada Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dalam mendukung penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin sebagai berikut: Melakukan pengoptimalan alokasi anggaran terutama pada manajemen Data Terpadu Sosial Banua, Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di satu instansi pemerintahan saja yakni Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Manajemen Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) Dalam Mendukung Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawaty, D., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 130-143.

- <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1349>
- Eaton, S. E., Stoesz, B. M., Crossman, K., Garwood, K., & McKenzie, A. (2022). Faculty perspectives of academic integrity during COVID-19: A mixed methods study of four Canadian universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 52(3), 42–58. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85148644054>
- Fatimah, Y. (2019). Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penempatan pejabat struktural di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA*, 7(2), 103–125. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/article/view/1149>
- Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. *International Journal of Diversity in Education*, 25(2), 1–21. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740>
- Kaligis, D., Syafri, W., & Mansyur, M. (2020). Analisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 34-47. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1343>
- Lasari, D., & Ali, H. (2023). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/6224>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2598>
- Marselini, T. (2024). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/80365/>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104. <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363>
- Nuridin, N., & Hartati, S. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi dalam ilmu sosial*. Prenadamedia Group.
- Ruskarini, M. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan dan aplikasi*. Deepublish.
- Simangungsong, F. M. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora*. Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Alfabeta, Ed.). Alfabeta.

Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>

Wati, S. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22804/>

Yusuf, M., Haryanto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). Teori manajemen. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Islam.

